

Dukung Percepatan Pembahasan RUU Terorisme

Komnas HAM Anggap

Pelibatan TNI Nggak Pas

RAJAT MERDEKA, 21/05/18

KOMNAS HAM menyatakan mendukung percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Terorisme. Ini untuk merespons gencarnya aksi-aksi terorisme di beberapa wilayah, khususnya di Jawa Timur, yang telah menimbulkan puluhan korban jiwa dan puluhan lainnya luka-luka.

Komisioner Komnas HAM, Mochamad Choirul Anam mengatakan, dalam RUU tersebut harus dipertegas paradigma penanganan terorisme di bawah sistem peradilan pidana. "Proses hukum dan prinsip penghormatan atas hak asasi manusia harus diutamakan," ujarnya.

Selain itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan terorisme dengan KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi terkait perencanaan, percobaan, turut serta dan penghasutan. Komnas HAM juga memberi catatan ketentuan penyadapan yang harus

disesuaikan antara kepentingan penegakan hukum dan intelijen, dengan mengutamakan asas hukum yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

"Dalam aspek penangkapan dan penahanan, harus dijelaskan aspek lokasi penahanan dan jangka waktunya," kata Anam.

Lebih lanjut, pihaknya mengapresiasi RUU Tindak Pidana Terorisme. Karena sudah memasukkan aspek hak-hak korban terorisme dan ada pengaturan yang lebih komprehensif dari upaya pencegahan, penindakan, pemulihan hak korban dan upaya deradikalisasi.

Namun terkait pelibatan TNI, Komnas HAM menyatakan, hal ini tidak tepat. Karena pemberantasan terorisme diatur dalam koridor sistem peradilan pidana yang menjadi wewenang kepolisian. "Keterlibatan TNI sudah diatur dalam UU Tentara Nasional Indonesia yaitu dalam operasi militer selain perang," tandas Anam. ■ OSP